

**PERAN DAN TANGGUNG JAWAB DISHUB (DLLAJR) DALAM
PENEGAKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2009
LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN**

NASKAH PUBLIKASI

Disusun dan Diajukan untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Syarat-syarat
Guna Mencapai Derajat Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Surakarta



Disusun Oleh:

AYU WIDAWATI
C 100110025

**FAKULTAS HUKUM
UNIVRSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA**

2016

HALAMAN PENGESAHAN

Naskah Publikasi ini telah di terima dan disahkan oleh
Dewan Penguji Skripsi Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Surakarta

Pada

Hari : Kamis

Tanggal : 18 Februari 2016

Pembimbing I



(Muchamad Iksan, S.H., M.H)

Pembimbing II

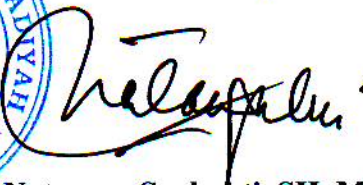


(Bambang Sukoco, S.H., M.H)

Mengesahkan

Dekan Fakultas Hukum

Universitas Muhammadiyah Surakarta



(Dr. Natangsa Surbakti, SH, M.Hum)

**PERAN DAN TANGGUNG JAWAB DISHUB (DLLAJR) DALAM
PENEGAKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2009
LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN**

Ayu Widawati
C.100.110.025
Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Surakarta
popo_lutu@yahoo.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran Dinas Perhubungan dan pelaksanaan dari penegakan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan untuk mengetahui hambatan-hambatan dan solusi mengatasi hambatan tersebut. Metode penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum yuridis empiris. Sumber data diperoleh dari data sekunder yaitu sumber hukum primer, sekunder dan tersier. Metode pengumpulan data melalui studi kepustakaan. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis data kualitatif dengan metode induktif. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa, peran Dinas Perhubungan Sukoharjo dalam penegakan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah sebagai pelaksana teknis undang-undang yakni sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan kewenangannya berdasarkan otonomi daerah yang diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 11 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Hambatan yang dihadapi Dinas Perhubungan Sukoharjo dalam penindakan pelanggaran lalu lintas, dimana harus dengan pendampingan dan koordinasi Kepolisian sehingga kewenangannya menjadi tumpang tindih. Sering kali dalam melakukan penindakan pelanggaran lalu lintas di jalan bersama polisi, Dinas Perhubungan hanya sebagai pendamping polisi yang menyebabkan perannya menjadi minoritas.

Kata Kunci: tanggung jawab hukum, penegakan hukum, penindakan pelanggaran

ABSTRACT

This study aims to determine the role of the Department of Transportation and the implementation of the enforcement of Law No. 22 of 2009 on Traffic and Road Force and to identify any obstacles and solutions to overcome these obstacles. This research method is a kind of juridical empirical legal research. Sources of data obtained from secondary data source of primary law, secondary and tertiary. Data were collected through the study of literature. Data analysis technique used is the analysis of qualitative data with an inductive method. Based on the results of this study concluded that, the role of the Department of Transportation Sukoharjo in the enforcement of Law No. 22 Year 2009 regarding Traffic and Road Transportation is a technical implementation legislation that is in accordance with the legislation in force and the authority under regional autonomy stipulated in Sukoharjo District Regulation No. 11 Year 2011 on the Implementation of Traffic and Transportation. Barriers faced by the Department of Transportation Sukoharjo in the prosecution of traffic violations, which should be the facilitation and coordination of the Police so that its authority be overlapping. Often in doing enforcement of traffic violations on the road along with the police, the Department of Transportation only as a police escort led to his role to be a minority.

Keywords: liability, law enforcement, prosecution offense

PENDAHULUAN

Seiring dengan berkembangnya era globalisasi yang semakin maju, semakin berkembang pula tingkat mobilitas masyarakat dalam kegiatan dan aktivitas sosialnya. Karenanya diperlukan adanya fasilitas transportasi yang dapat menopang kegiatan dan mobilitas masyarakat yang semakin berkembang tersebut. Kebutuhan penyediaan sarana transportasi yang menunjang tersebut tidak dapat berdiri sendiri melalui peran satu pihak saja. Diperlukan adanya peran serta antara Dinas Perhubungan yang berperan sebagai manajemen transportasi, Dinas Pekerjaan Umum sebagai bidang penyedia prasarana jalan, dan POLRI yang berperan sebagai lembaga penegak hukum.

Peran serta ketiga lembaga tersebut dapat menciptakan suatu tujuan terbentuknya sistem transportasi yang aman, lancar, tertib. Perhubungan sendiri adalah suatu tataran sistem penyelenggaraan transportasi darat maupun perairan daratan yang saling berkaitan satu sama lain dan berintegritas secara keseluruhan dengan ruang lalu lintas (jalan, jembatan, dan atau rel) yang berada di bawah sistem otonomi daerah. Dinas Perhubungan adalah suatu lembaga yang terdiri secara mandiri dalam melaksanakan peran pelaksanaan kebijakan berdasarkan pemerintahan otonomi daerah.¹ Dengan adanya otonomi daerah memberikan desentralisasi pada Dinas Perhubungan untuk melaksanakan otonomi seluas-luasnya berikut semua aparatur dan keuangannya kecuali hal-hal yang bersifat nasional yang akan diatur dan undang-undang.²

Kemenhub adalah lembaga yang mempunyai wewenang mengeluarkan kebijakan dan/atau aturan hukum yang mengatur tentang masalah transportasi. Kebijakan atau aturan hukum yang dikeluarkan oleh Pemerintah Pusat adalah suatu aturan hukum yang mengikat segala pihak yang terlibat di dalam kegiatan transportasi. Namun setelah adanya otonomi daerah, DLLAJR selaku Dinas Perhubungan mempunyai kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri segala urusan rumah tangganya (transportasi) sesuai dengan ketentuan otonomi daerah yang diperkuat dengan adanya Peraturan Daerah yang mengatur

¹M.N.Nasution, 2008, *Manajemen Transportasi*, Bogor: Ghalia Indonesia, hal.95.

²C.S.T. Kansil, 1984, *Hukum Tata Pemerintahan Indonesia*, Jakarta : Ghalia Indonesia. Hal. 280

tentang kewenangan otoritas Dinas Perhubungan dalam menjalankan fungsinya. DISHUB (DLLAJR) adalah lembaga yang berdiri berdasarkan desentralisasi.

Desentralisasi di sini mengandung pengertian pelepasan diri dari pusat, atau pelimpahan kekuasaan pemerintah dari pusat pada daerah-daerah yang mengurus rumah tangganya sendiri (daerah otonom).³ Namun tidak banyak pula pihak yang dapat mengapresiasi peran Dinas Perhubungan (DLLAJR) dengan segala kewenangan dan fungsinya. Sering kali hanyalah fungsi teknis lapangan saja yang dipahami oleh masyarakat. Contoh tindakan teknis yang paling banyak diketahui oleh masyarakat adalah kegiatan mengatur lalu lintas jalan, penggantian lampu *traffic light*, pemasangan rambu lalu lintas, menilang angkutan umum yang melanggar peraturan (menarik retribusi), atau kegiatan teknis lapangan lainnya.

Salah satu contoh peran Dinas Perhubungan dalam menjaga terjaganya sistem lalu lintas yang terpadu adalah dengan penegakan Pasal 276 Undang-Undang No.22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan: *"Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor Umum dalam trayek tidak singgah di Terminal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau denda paling banyak Rp.250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah)"* Jika dikaji dari ketentuan pasal tersebut, dapat ditarik kesimpulan bahwa peran Dinas Perhubungan (DLLAJR) dalam menertibkan aturan lalu lintas angkutan umum adalah suatu upaya implementasi atas kewenangannya dalam menjaga ketertiban lalu lintas di Terminal, serta aturan yang sudah diatur sebelumnya agar tercipta suatu sistem transportasi yang aman tertib dan lancar, karena berdasarkan Pasal 36 UU LAJ sudah diatur ketentuan: *"Setiap Kendaraan Bermotor Umum dalam trayek wajib singgah di Terminal yang sudah ditentukan, kecuali ditetapkan lain dalam izin trayek"* hal ini sebagai upaya pengembalian fungsi Terminal yang belakangan sudah tidak diperhatikan oleh pengemudi kendaraan bermotor umum. Dimana sebenarnya Terminal merupakan wadah untuk mobilitas publik suatu wilayah tertentu, atau sebagai pintu masuk datangnya orang-orang dari luar daerah ke wilayah tertentu.

³Abdurrahman, 1987. *Beberapa Pemikiran Tentang Otonomi Daerah*, Jakarta: Media Sarana Perss.

Wajibnya angkutan umum dalam trayek wajib singgah di Terminal sebagai penyedia sarana transportasi publik dan sebagai perwujudan keberhasilan pembentukan tata ruang kota. Dengan adanya suatu kebijakan yang dibuat untuk kepentingan publik, maka Pemerintah Daerah bersama Dinas Perhubungan harus membentuk suatu kebijakan yang bertujuan untuk mensejahterakan kepentingan masyarakat (dalam hal ini di bidang transportasi). Kebijakan publik biasanya tidak bersifat spesifik dan sempit, tetapi luas, berada pada strata strategis. Oleh sebab itu kebijakan publik berfungsi sebagai pedoman umum untuk kebijakan dan keputusan-keputusan khusus di bawahnya.⁴ Kebijakan yang dibuat dapat berupa perencanaan pembangunan sistem transportasi dan/atau pelaksanaan peraturan yang berkaitan dengan sistem transportasi (dalam lingkup terminal).

Sementara itu, kewenangan terbatas dalam melakukan tindakan hukum yang dimiliki Dinas Perhubungan dalam kaitannya di jalan raya tersirat dalam UU LLJ yang tertuang dalam Pasal 262 ayat (3).⁵ Berdasarkan gambaran pasal tersebut terbentuk suatu paradigma bahwa antara Dinas Perhubungan dengan lembaga Kepolisian bersama-sama menyelenggarakan sistem transportasi (LLAJ) tetapi pada dasarnya antara kedua lembaga tersebut tetap mempunyai porsi yang berbeda dalam melaksanakan kewenangan melakukan tindakan yang dapat mereka lakukan baik dalam hal melakukan tilang atau pengaturan aturan lalu lintas jalan. Untuk itu muncul pemikiran apakah peran Dinas Perhubungan hanya sebagai lembaga pembantu dalam mengatur sistem lalu lintas yang terstruktur atau ada peran penting lain yang dimiliki Dinas Perhubungan dalam menciptakan sistem lalu lintas sesuai dengan Undang-undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Berdasarkan uraian di atas, maka penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran Dinas Perhubungan (DLLAJR) dalam pelaksanaan dan penegakan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan kendala yang dihadapi Dinas Perhubungan (DLLAJR) dalam penegakan Undang-undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan beserta solusinya.

⁴ Said Zainal Abidin, 2012, *Kebijakan Publik*, Jakarta : Salemba Humanika. Hal. 8

⁵ Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan

Metode penelitian menggunakan penelitian *yuridis empiris*, karena menggunakan sumber data sekunder atau data yang diperoleh melalui bahan-bahan kepustakaan. Metode pengumpulan data dengan studi kepustakaan. Setelah data terkumpul kemudian dianalisis menggunakan metode analisis kualitatif yaitu data yang diperoleh kemudian disusun secara sistematis untuk selanjutnya dianalisis secara kualitatif untuk mencapai kejelasan masalah dibahas.⁶ Adapun teknis pengambilan kesimpulannya adalah metode induktif.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Peran Dinas Perhubungan (DLLAJR) dalam Pelaksanaan dan Penegakan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Berkaitan dengan masalah angkutan umum, pada dasarnya ada empat komponen pokok yang berkaitan dengan operasi angkutan umum, yaitu pemakai jasa (*user*), operator (pemilik kendaraan), regulator (pemerintah), dan perangkat hukum (*law enforcement*).⁷ Berdasarkan keempat komponen tersebut dibutuhkan sinergitas antara para pihak untuk mewujudkan sistem transportasi yang sesuai dengan tujuan perwujudan sistem Lalu Lintas yang aman, tertib, dan lancar, termasuk pula di lingkup Terminal atau angkutan Jalan. Jika melihat pada masalah Angkutan Jalan terdapat peran Dinas Perhubungan yang berfungsi untuk mengatur kelancaran sistem transportasinya. Adapun tata cara mengangkut orang dan atau barang beserta penggandengan dan penempelan dengan kendaraan lain dalam lingkup Terminal yaitu (1) Penetapan larangan penggunaan jalan, dan (2) Penunjukan lokasi, pembuatan dan pemeliharaan tempat pemberhentian untuk kendaraan umum.⁸

Peran Dinas Perhubungan dalam lalu lintas sesuai Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan mempunyai tugas-tugas pokok sesuai bidangnya antara lain: *Pertama*, bidang lalu lintas, terbagi atas seksi

⁶Ronny Hanintijo Soemitro, 1990, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Jakarta: Ghalia Indonesia, hal. 16

⁷Djoko Setijowarno, Tulus Abadi, Sudaryatmo, 2005, *Fakta Kebijakan Transportasi Publik di Indonesia*, Semarang: Universitas Katolik Soegijapranata. Hal 25

⁸Edy Halomoan Gurning, 2010, *Implementasi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Raya*. Pengacara Publik dan Staf Penelitian Pengembangan pada Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta, hal. 110

manajemen dan rekayasa lalu lintas yang didalamnya berkaitan dengan perencanaan sistem lalu lintas yang aman, tertib, dan lancar serta penyediaan sarana dan prasarana lalu lintas. *Kedua*, bidang sarana dan prasarana, bertugas dalam hal PKB (Pengujian Kendaraan Bermotor). *Ketiga*, bidang operasional, terbagi atas seksi operasional dan seksi keselamatan penyeberangan di atas air. *Keempat*, Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) adalah bidang dari Dinas Perhubungan yang bertugas untuk urusan lapangan (Terminal, kawasan parkir, dan radio siaran pusat daerah), pelaksana teknis ini berkaitan dengan pengaturan dan pengawasan secara langsung kelancaraan lalu lintas di lingkup Terminal.⁹

Dinas Perhubungan Sukoharjo mempunyai peran, tugas, dan kewenangan untuk melaksanakan segala urusan rumah tangganya sendiri (dibidang lalu lintas dan angkutan jalan) sesuai dengan otonomi daerah yang diatur berdasarkan Peraturan Daerah nomor 19 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Berdasarkan dengan pembagian bidang-bidang tugas dan peran Dinas Perhubungan dalam lalu lintas dan angkutan jalan dan tugas pembantuan di bidang Perhubungan, Dinas Perhubungan dalam melaksanakan tugasnya mempunyai fungsi sebagai: (a) Perumus kebijakan teknis pelaksanaan di bidang perhubungan, (b) Pelaksana pembinaan operasional di bidang perhubungan, (c) Pengendali dan pengawas teknis di bidang perhubungan, (d) Pemberi bimbingan teknis di bidang perhubungan, (e) Pemberian ijin dan pelaksanaan pelayanan umum, (f) Pelaksana Rumah Tangga dan Tata Usaha Dinas Perhubungan, dan (g) Penindak pelanggaran Lalu Lintas berkaitan surat tilang didasarkan atas hasil temuan dalam proses pemeriksaan kendaraan bermotor di jalan, hasil laporan, dan hasil rekaman peralatan elektronik.¹⁰

Penegakan lalu lintas yang dapat dilakukan oleh Dinas Perhubungan sesuai Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah sebagaimana peran dan kewenangannya. Sesuai data yang diperoleh di atas dapat dilihat bahwa peran dan kewenangan Dinas Perubungan dalam

⁹Wiratmo, Pegawai Negeri Sipil DISHUB Sukoharjo, *Wawancara Pribadi*, Surakarta, Kamis, 9 Desember 2015, pukul 10.00 WIB

¹⁰Darsono, Kabid Infokom DISHUB Sukoharjo, *Wawancara Pribadi*, Surakarta, Kamis, 9 Desember 2015, pukul 10.00 WIB

melakukan penegakan lalu lintas secara sepenuhnya adalah yang terjadi dalam lingkup Terminal sebagaimana kewenangan yang dimiliki dari Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Kendala dan Solusi yang Dihadapi Dinas Perhubungan (DLAJR) dalam Penegakan Undang-undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Secara teknis tidak ada kendala yang benar-benar dihadapi Dinas Perhubungan dalam pelaksanaan Undang-undang ini.¹¹ Dalam hal penegakan Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan menurut Darsono, Dinas Perhubungan bertindak sesuai dengan kewenangan yang dimiliki berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kewenangan bertindak yang dimiliki Dinas Perhubungan ini dalam sistem transportasi secara yuridis memang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, namun dalam eksekusi di lapangan Dinas Perhubungan adalah pelaksana teknis dari undang-undang itu sendiri, sehingga dalam hal melakukan penindakan pelanggaran lalu lintas di jalan Dinas Perhubungan menjadi lembaga pembantu Kepolisian yang berperan sebagai penegak hukum. Dalam penegakan lalu lintas di jalan, karena kewenangan menindak tetap berada di bawah kekuasaan Kepolisian sehingga peran Penyidik PPNS Dinas Perhubungan secara mutlak tidak dapat melakukan tindakan hukum apapun tanpa pendampingan dan koordinasi dari Kepolisian.¹²

Penerapan Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu lintas dan Angkutan Jalan dinilai berjalan di tempat. Penyebab utama penghambat kelancaran implementasi undang-undang ini adalah tidak mendukungnya pelaksanaan dilapangan yang terkesan masih setengah-setengah dapat dilakukan Dinas Perhubungan dan Kepolisian, serta pembagian kekuasaan kewenangan bertindak antara Dinas Perhubungan dan Kepolisian. Sarana diluar hal teknis (rambu-rambu lalu lintas) yang perlu disediakan untuk mendukung kelancaran implementasi Undang-undang ini adalah struktur organisasi yang terorganisir dan

¹¹Darsono S.H, M.Hum Kabid Infokom DISHUB Sukoharjo, *Wawancara Pribadi*, Surakarta, Kamis, 9 Desember 2015, pukul 10.00 WIB

¹² Wiratmo, Pegawai Negeri Sipil DISHUB Sukoharjo, *Wawancara Pribadi*, Surakarta, Kamis, 9 Oktober 2014, pukul 17.00 WIB

sistematis yang memiliki pemisahan kewenangan dalam melaksanakan norma peraturan yang berlaku. Kendala inilah yang timbul dalam penerapan peraturan perundang-undangan lalu lintas karena dalam undang-undang ini Dinas Perhubungan hanyalah sebagai pelaksana teknis dari undang-undang tetapi penindakan pelanggaran lalu lintas tetap berada dibawah Kepolisian yang dalam Undang-undang ini memang tidak dijelaskan secara jelas tentang pemisahan kewenangan penindakan antara Dinas Perhubungan dan Kepolisian.¹³

Dinas Perhubungan yang dalam sistem lalu lintas sebagai pelaksana teknis Undang-undang hanya bertindak sebagaimana kewenangannya dalam Undang-undang saja tanpa bisa melakukan tindakan hukum lain diluar kewenangan yang dimiliki dari Undang-undang lalu lintas itu sendiri. Hal ini terlihat dari kebebasannya bertindak (menindak pelanggran lalu lintas) yang dapat dilakuakn sepenuhnya hanya dalam lingkup Terminal saja, sedangkan untuk penindakan pelanggaran lalu lintas yang terjadi dijalan harus dengan koordinasi dan pendampingan dari Kepolisian sebagai *law enforcement* (penegak hukum).¹⁴

Menurut Darsono, keberadaan penyidik PPNS Dinas Perhubungan dalam Dinas Perhubungan sendiri memang tidak sebanyak keberadaan pegawai Dinas Perhubungan yang ada. Faktor kurangnya Sumber Daya Manusia (penyidik PPNS) yang memiliki potensi dan kemampuan dalam melaksanakan tugas dan kewajiban dalam lingkup lalu lintas lah yang menyebabkan terjadinya hal ini.¹⁵ Faktor ketidakcakapan pegawai Dinas Perhubungan sendiri sedikit banyak terjadi karena kurangnya pemahaman dan/atau kemampuan mengaplikasikan aturan hukum atas pelanggaran lalu lintas, kurangnya perhatian dan pelatihan dari pusat yang membuat minimnya kedayagunaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil Dinas perhubungan dalam peneggakan dan penindakan lalu lintas.¹⁶ Lebih lanjut Darsono menyatakan, terdapat kendala kurangnya keberadaan aparat penegak

¹³Darsono, S.H, M.Hum Kabid Infokom DISHUB Sukoharjo, *Wawancara Pribadi*, Surakarta, Kamis, 9 Desember 2015, pukul 10.00 WIB

¹⁴ Darsono, S.H, M.Hum Kabid Infokom DISHUB Sukoharjo, *Wawancara Pribadi*, Surakarta, Kamis, 9 Desember 2015, pukul 10.00 WIB

¹⁵ Darsono, S.H, M.Hum Kabid Infokom DISHUB Sukoharjo, *Wawancara Pribadi*, Surakarta, Kamis, 9 Desember 2015, pukul 10.00 WIB

¹⁶Wiratmo, Pegawai Negeri Sipil DISHUB Sukoharjo, *Wawancara Pribadi*, Surakarta, Kamis, 9 Oktober 2014, pukul 17.00 WIB

hukum (pegawai penyidik PPNS Dinas Perhubungan Sukoharjo). Faktor kurangnya aparat penegak hukum dalam penindakan pelanggaran lalu lintas ini menjadi salah satu poin yang dapat memunculkan pertanyaan bagaimana peran Dinas Perhubungan dalam melakukan penegakan lalu lintas dan angkutan jalan sesuai dengan Undang-undang yang berlaku.¹⁷

Melihat fungsi dari Dinas Perhubungan itu sendiri yang merupakan pelaksana teknis Undang-undang, keberadaan Penyidik PPNS Dinas Perhubungan dalam penegakan lalu lintas telah tertuang dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009. Bila dikaji lebih dalam lagi memang peran penyidik PPNS Dinas Perhubungan hanya seperti pendamping dan pembantu Kepolisian dalam melakukan penindakan pelanggaran lalu lintas, hal ini termasuk pula tindakan penyidik PPNS Dinas Perhubungan untuk melakukan penindakan yang memerlukan pemeriksaan khusus oleh penyidik PPNS Dinas Perhubungan. Apabila pengertian peran Dinas Perhubungan dalam penegakan lalu lintas sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku khususnya dalam hal penindakan pelanggaran lalu lintas ditelaah lebih dalam lagi. Maka dapat disimpulkan bahwa Dinas Perhubungan berfungsi untuk melakukan upaya penyediaan sarana dan prasarana penegakan lalu lintas (rambu-rambu lalu lintas, *traffic light*, marka jalan) sedangkan yang berhak melakukan penindakan atas pelanggaran lalu lintas tersebut adalah Kepolisian.¹⁸

Keberadaan Dinas Perhubungan penyidik PPNS Dinas Perhubungan yang berada di jalan hanya sebagai pemberi informasi dan fasilitasi kepada Polisi yang bertindak di jalan untuk melakukan penindakan atas pelanggaran lalu lintas yang terjadi. Adapun pengawasan yang dilakukan di jalan oleh Kepolisian bersama dengan Dinas Perhubungan apabila tidak ada pelanggaran yang membutuhkan penindakan oleh Dinas Perhubungan maka kedudukan Dinas Perhubungan itu sendiri hanya dapat berperan sebagai pendamping polisi, atau dapat dikatakan hanya sebagai pemantau kelancaran sistem lalu lintas. Kenyataan di lapangan atas

¹⁷Darsono S.H, M.Hum Kabid Infokom DISHUB Sukoharjo, *Wawancara Pribadi*, Surakarta, Kamis, 9 Desember 2015, pukul 10.00 WIB

¹⁸Darsono, Kabid Infokom DISHUB Sukoharjo, *Wawancara Pribadi*, Surakarta, Kamis, 9 Desember 2015, pukul 10.00 WIB

kewenangan Dinas Perhubungan dan Kepolisian inilah yang kemudian memunculkan permasalahan bagaimana Dinas Perhubungan dapat melakukan penegakan lalu lintas apabila kewenangan bertindak dilapangan tidak secara penuh dimiliki Dinas Perhubungan. Dinas Perhubungan Sukoharjo hanya mempunyai satu penyidik PPNS yang dapat melakukan penindakan pelanggaran lalu lintas sesuai kewenangannya.¹⁹ Sesuai dengan pembagian tugas dan kewajibannya, penyidik PPNS Dinas Perhubungan Sukoharjo ini merupakan bagian dari bidang operasional dari sub struktur bidang Dinas Perhubungan yang didalamnya terdapat seksi operasional dan keselamatan yang berdasarkan bidang yang dibawahinya tersebut penyidik PPNS Dinas Perhubungan tersebut dapat melakukan penindakan atas pelanggaran lalu lintas dengan melakukan koordinasi Kepolisian untuk mewujudkan penegakan Lalu Lintas. Sesuai dengan ketentuan Pasal 262 Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Tindakan Dinas Perhubungan dalam melakukan segala tindakan berdasarkan otoritasnya dilingkup Terminal dan/atau segala sesuatu yang berhubungan dengan angkutan umum/barang juga mempunyai kekuatan hukum berdasarkan ketentuan undang-undang yang berlaku.²⁰ Berdasarkan Pasal 262 ayat (1) huruf b, c, e, f, dapat dikatakan pula otoritas yang dimiliki Dinas Perhubungan tidak hanya berdasarkan otonomi daerah tetapi juga berdasarkan Undang-undang yang kekuatannya dapat dijadikan payung hukum bagi Dinas Perhubungan dalam melakukan segala tindakannya. Kewenangan menindak pelanggaran lalu lintas yang dapat dilakukan Dinas Perhubungan di lingkup Terminal dapat dilakukan dengan segala otoritas yang dimiliki dalam lingkup Terminal dapat berupa pelanggaran yang bersifat perizinan, kelengkapan surat-surat/ dokumen, dan tata cara berlalu lintas dalam lingkup angkutan jalan.

Penindakan pelanggaran lalu lintas tersebut diantaranya mengatur tentang kelengkapan surat-surat dan dokumen-dokumen muatan, hal-hal yang berkaitan

¹⁹Darsono, Kabid Infokom DISHUB Sukoharjo, *Wawancara Pribadi*, Surakarta, Kamis, 9 Desember 2015, pukul 10.00 WIB

²⁰ Wiratmo, Pegawai Negeri Sipil DISHUB Sukoharjo, *Wawancara Pribadi*, Surakarta, Kamis, 9 Oktober 2014, pukul 17.00 WIB

dengan pelanggaran perizinan angkutan, dan yang berkaitan dengan tata cara dan pengawasan muatan. yang didalamnya mengatur tentang kelengkapan surat-surat dan dokumen muatan.

Kewenangan menindak pelanggaran lalu lintas yang sepenuhnya dimiliki Dinas Perhubungan hanya berupa pelanggaran yang bersifat administratif. Sedangkan pelanggaran yang bersifat teknis yang dapat ditindak oleh Dinas Perhubungan lebih banyak dilakukan di jalan walaupun penindakan tersebut harus berdasar koordinasi dan didampingi oleh Kepolisian. Tumpang tindih kewenangan melakukan penindakan pelanggaran lalu lintas antara Dinas Perhubungan dan Kepolisian dapat dilihat ketika Dinas Perhubungan dan Polisi melakukan pengaturan lalu lintas di jalan raya. Pada saat Kepolisian melakukan tugas dan kewenangannya di jalan (operasi tilang) sementara itu Dinas Perhubungan hanya dapat melakukan pengaturan lalu lintas dengan melakukan rekayasa lalu lintas atau melakukan perannya yang lain seperti melakukan pemasangan atau penertiban rambu lalu lintas, atau bahkan membantu orang menyebrang jalan.²¹

Kenyataan di lapangan itulah yang menimbulkan tumpang tindih kewenangan Dinas Perhubungan dan Kepolisian dalam melakukan penindakan lalu lintas di jalan.²² Jika melihat pada payung hukum yang digunakan sebagai dasar hukum atas kewenangan yang dimiliki Dinas Perhubungan dalam melakukan penindakan pelanggaran lalu lintas, memang berdasarkan Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan telah ditentukan Dinas Perhubungan mana yang dapat melakukan penindakan lalu lintas. Dalam Pasal 262 ayat (3) telah dirumuskan tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS Dinas Perhubungan) yang dapat melakukan penindakan di jalan.

²¹Darsono, Kabid Infokom DISHUB Sukoharjo, *Wawancara Pribadi*, Surakarta, Kamis, 9 Desember 2015, pukul 10.00 WIB

²²Darsono, Kabid Infokom DISHUB Sukoharjo, *Wawancara Pribadi*, Surakarta, Kamis, 9 Desember 2015, pukul 10.00 WIB

Solusi Penegakan Lalu Lintas

Solusi untuk dapat ditegakkannya sistem lalu lintas dan angkutan jalan adalah dengan dilakukannya pemberdayaan dan peningkatan kualitas dari Dinas Perhubungan ataupun dari Sumber Daya Manusia Dinas Perhubungan itu sendiri (penyidik PPNS Dinas Perhubungan). Sesuai dengan kewenangan yang dimiliki, upaya penegakan lalu lintas yang dilakukan Dinas Perhubungan sesuai Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Dinas Perhubungan.

Penelitian ini yang secara khusus dilakukan di Sukoharjo atas peran dan tanggung jawab Dinas Perhubungan Sukoharjo dalam penegakan Undang-Undang Lalu Lintas dapat dilihat bahwa kekurangan penyidik PPNS Dinas Perhubungan untuk dapat melakukan penindakan pelanggaran lalu lintas masih dirasa sangat minim, hal ini karena dalam Dinas Perhubungan Sukoharjo hanya mempunyai satu penyidik PPNS Dinas Perhubungan saja. Kekurangan penyidik PPNS Dinas Perhubungan ini dapat menjadi kendala penegakan lalu lintas itu sendiri karena penindakan pelanggaran lalu lintas yang terjadi di jalan yang dilakukan oleh penyidik PPNS Dinas Perhubungan dengan dilakukan koordinasi dan pendampingan dari Kepolisian membutuhkan kemampuan penafsiran, dan pengaplikasian kedayagunaan, pemahaman, dan penafsiran Undang-undang lalu lintas dan angkutan jalan. Peningkatan kualitas pegawai Dinas Perhubungan sendiri juga harus lebih mendapat perhatian dari pusat agar dapat dibentuk suatu sistem jaringan informasi dan komunikasi Dinas Perhubungan yang benar-benar dapat menjalankan tugas dan fungsinya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Perlunya peran pemerintah dan/atau pusat dalam melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap Dinas Perhubungan adalah salah satu upaya peningkatan mutu yang harus dilakukan untuk membentuk suatu lembaga pengatur, penyusun, perencana sistem lalu lintas yang aman, tertib, dan lancar. Sedangkan untuk masalah tumpang tindih tindakan Dinas Perhubungan dan Kepolisian di jalan dalam melakukan penindakan atas pelanggaran lalu lintas secara struktur telah tersusun dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009

tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang didalamnya telah dibagi peran dan kewenangan Dinas Perhubungan dan Kepolisian dalam melakukan penindakan sesuai dengan kewenangannya masing-masing. Untuk Dinas Perhubungan sebagai sarana untuk melakukan penegakan lalu lintas dapat dilakukan oleh penyidik PPNS Dinas Perhubungan yang telah diberi kewenangan khusus oleh Undang-undang untuk dapat melakukan penindakan atas pelanggaran lalu lintas dengan melakukan koordinasi dan pendampingan Kepolisian.

PENUTUP

Kesimpulan

Pertama, peran dan kewenangan Dinas Perhubungan dalam penegakan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah sebagai pelaksana teknis undang-undang. Sehingga segala tindakan yang dimiliki dan dilakukan oleh Dinas Perhubungan dalam penegakan lalu lintas dan angkutan jalan harus berdasarkan dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sedangkan kewenangan Dinas Perhubungan dalam lingkup Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di Terminal adalah kewenangan penuh yang dimiliki Dinas Perhubungan berdasarkan otonomi daerah yang diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 11 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Adanya otonomi daerah tersebut secara mutlak Dinas Perhubungan dapat melakukan tindakan apa saja yang berkaitan dengan lalu lintas dan angkutan jalan di lingkup Terminal.

Kedua, kedudukan Dinas Perhubungan dalam Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah sebagai *traffic management* (lembaga pengatur dan perencana lalu lintas), dan *traffic engineering* (pelaksana rekayasa lalu lintas). Kedudukan Dinas Perhubungan sebagai *traffic management* (lembaga pengatur dan perencana lalu lintas) adalah penyusun, dan perencana terwujudnya sistem lalu lintas yang aman, tertib, lancar. Sebagai *traffic engineering* (pelaksana rekayasa lalu lintas) Dinas Perhubungan adalah perancang, perencana, dan operasional lalu lintas baik di jalan, terminal atau pun segala hal yang berkaitan dengan pengaturan lalu lintas

angkutan jalan, rekayasa lalu lintas yang dilakukan Dinas Perhubungan. Kegiatan operasional dan/atau pengaturan sistem lalu lintas dan angkutan jalan itulah salah satu peran Dinas Perhubungan sebagai salah satu upaya operasional yang dapat dilakukan Dinas Perhubungan dalam penegakan sistem lalu lintas.

Ketiga, kewenangan menindak pelanggaran lalu lintas yang dapat dilakukan Dinas Perhubungan di jalan, dimana harus dengan pendampingan dan koordinasi Kepolisian menjadi masalah tumpang tindih kewenangan Dinas Perhubungan dalam melakukan penindakan di jalan. Sering kali dalam melakukan penindakan pelanggaran lalu lintas di jalan bersama polisi Dinas Perhubungan hanya sebagai pendamping polisi. Karena jika tidak ada pelanggaran yang memerlukan pemeriksaan oleh Dinas Perhubungan, Dinas Perhubungan hanya berada bersama polisi saja sebagai penunjuk adanya pelanggaran lalu lintas. Hal ini karena kedudukan Dinas Perhubungan sebagai pelaksana teknis undang-undang saja yang menyebabkan peran Dinas Perhubungan dalam penindakan lalu lintas menjadi minoritas. Solusinya untuk Dinas Perhubungan sebagai sarana untuk melakukan penegakan lalu lintas dapat dilakukan oleh penyidik PPNS Dinas Perhubungan yang telah diberi kewenangan khusus oleh Undang-undang untuk dapat melakukan penindakan atas pelanggaran lalu lintas dengan melakukan koordinasi dan pendampingan Kepolisian.

Saran

Pertama, bagi pemerintah hendaknya dalam pembentukan peraturan perundang-undangan (undang-undang lalu lintas dan angkutan jalan, dan/atau Peraturan daerah), kedudukan Dinas Perhubungan dalam penegakan lalu lintas perlu diperluas perannya karena pada kenyataan berdasarkan perundang-undangan kewenangan menindak yang penuh hanya dalam lingkup Terminal saja sehingga upaya penegakan undang-undang hanya sebatas bagian kecil saja.

Kedua, bagi Dinas Perhubungan Sukoharjo, hendaknya diadakan pelatihan dan peningkatan kualitas SDM Dinas Perhubungan dalam hal keberadaan

penyidik PPNS untuk dapat melakukan penindakan pelanggaran lalu lintas di jalan raya. Terakhir untuk masyarakat peningkatan pemahaman akan pentingnya kesadaran berlalu lintas yang baik dapat menjadi poin penting dalam penegakan undang-undang lalu lintas dan angkutan jalan karena dengan minimnya pelanggaran lalu lintas dapat menjadi bukti bahwa penegakan lalu lintas dapat berjalan dengan baik.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abdurrahman, 1987. *Beberapa Pemikiran Tentang Otonomi Daerah*, Jakarta: Media Sarana Pers.
- Abidin, Said Zainal. 2012. *Kebijakan Publik*, Jakarta: Salemba Humanika.
- Gurning, Edy Halomoan. 2010. *Implementasi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Raya*. Pengacara Publik dan Staf Penelitian Pengembangan pada Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta.
- Kansil, C.S.T. 1984. *Hukum Tata Pemerintahan Indonesia*, Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Nasution, M.N. 2008. *Manajemen Transportasi*, Bogor: Ghalia Indonesia.
- Setijowarno, Djoko dan Tulus Abadi, Sudaryatmo. 2005. *Fakta Kebijakan Transportasi Publik di Indonesia*. Semarang: Universitas Katolik Soegijapranata.
- Soemitro, Ronny Hanintijo. 1990. *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Jakarta: Ghalia Indonesia.

Aturan Perundang-undangan

- Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
- Peraturan Daerah No. 19 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.